

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Organisasi	:	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Bagian/bidang	:	Pengelolaan Pendapatan
Program	:	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan	:	Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub. Kegiatan	:	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran	:	2025

1. Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah Daerah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari Sub. Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Tersedianya Anggaran pendukung terlaksananya layanan penyelesaian atas keberatan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- b. Tujuan kegiatan ini adalah agar lancarnya penerimaan pajak daerah dan adanya kepuasan wajib pajak atas ketetapan yang telah diterbitkan pada Badan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Pelaksanaan Kegiatan

- a. **Nama Kegiatan** : Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- b. **Masukan/Input** :
 - **Jumlah Dana** yang dibutuhkan untuk kegiatan ini sebesar **Rp. 44.968.348,-**
 - **Jangka waktu** Pelaksanaan adalah 12 bulan (Januari – Desember 2025).

- c. **Keluaran/Ouput** : Terealisasiannya pelunasan atas ketetapan yang diterbitkan sehingga penyeteroran pajak ke Kas Daerah dapat dilaksanakan
- d. **Hasil** : Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah
- e. **Manfaat** : Tersedianya Pembiayaan Penunjang Operasional Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.
- f. **Dampak** : Meningkatnya kepercayaan masyarakat atas ketetapan yang telah diterbitkan sehingga kesadaran masyarakat dalam membayar pajak meningkat.

Disetujui oleh

Plt. Kepala Badan Pengelolaan keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan



Intan Novia Fatma Nada, SE.AK.M.AP.MPP
NIP. 19841111 200902 2 008

Painan, Desember 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Yanti Kusnita, SE
NIP. 19770131 200801 2 011

**SUB. KEGIATAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	TAHAPAN KEGIATAN	BULAN KE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	Membuat Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah												
3	Melakukan Pelayanan dan Memproses keberatan atas ketetapan pajak yang diterbitkan												
4	Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan												
5	Penyelesaian Administrasi Kegiatan												

STRUKTUR ORGANISASI
PEYUSUNAN PROSEDUR OPERASIONAL KEGIATAN
PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

